DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nodi Hendra[1], Dian Fitriani Afifah[2], Syahrepah Syam[3]
Universitas Terbuka[1,2,3]
Email : nodihendra1995@gmail.com
dian.fitriani@unpad.ac.id
syahrepah@kemsos.go.id

ABSTRACT

Stunting is a multidimensional public health problem with long-term implications for the quality of human resources, economic productivity, and the sustainability of regional development. In Indonesia, although various national policies have accelerated the reduction in stunting prevalence, regional disparities remain a serious challenge, particularly at the lowest levels of government, such as villages or nagari (village-based villages). This study aims to analyze the implementation of stunting management policies in Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency, with an emphasis on program implementation, cross-sectoral coordination, the role of local institutions, and human resource capacity at the nagari level. The research approach used was a case study with qualitative methods based on document analysis and secondary data, including local government reports, stunting prevalence data at the district and sub-district levels, and documentation of nagari activities. The analysis results indicate that the nagari has implemented a number of local initiatives such as nutrition posts, stunting discussions, and outreach activities, reflecting a commitment to local-level policies. However, the effectiveness of policy implementation still faces various obstacles, including limited integrated by-name-by-address data, uneven capacity of integrated health post (Posyandu) cadres, limited budget support, and the influence of structural factors such as poverty and family parenting patterns. This study confirms that the success of stunting management policies at the village level is determined not only by the existence of the program, but also by the quality of governance, data integration, and the sustainability of cross-sectoral interventions. Therefore, strengthening village institutional capacity, integrating e-PPGBM data into development planning, and a sustainable multisectoral approach are essential prerequisites for accelerating stunting reduction in rural areas.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Keywords : *Stunting, Public Policy, Nutrition Intervention, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie*

ABSTRAK

Stunting merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang bersifat multidimensional dan berimplikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Di Indonesia, meskipun berbagai kebijakan nasional telah mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan serius, khususnya pada level pemerintahan paling bawah seperti desa atau nagari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan stunting di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan menitikberatkan pada aspek implementasi program, koordinasi lintas sektor, peran kelembagaan lokal, serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat nagari. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode kualitatif berbasis analisis dokumen dan data sekunder, meliputi laporan pemerintah daerah, data prevalensi stunting tingkat kabupaten dan kecamatan, serta dokumentasi kegiatan nagari. Hasil analisis menunjukkan bahwa nagari telah melaksanakan sejumlah inisiatif lokal seperti pos gizi, rembuk stunting, dan kegiatan penyuluhan, yang mencerminkan adanya komitmen kebijakan di tingkat lokal. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan data by-name-by-address yang terintegrasi, kapasitas kader posyandu yang belum merata, dukungan anggaran yang terbatas, serta pengaruh faktor struktural seperti kemiskinan dan pola asuh keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, integrasi data, dan keberlanjutan intervensi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan nagari, integrasi data e-PPGBM dalam perencanaan pembangunan, serta pendekatan multisektoral yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah pedesaan.

Kata Kunci : Stunting, Kebijakan Publik, Intervensi Gizi, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada aspek kesehatan dan gizi anak. Kondisi ini ditandai oleh gangguan pertumbuhan linear akibat kekurangan gizi kronis dan paparan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Dampak stunting tidak

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

hanya bersifat biologis, tetapi juga sosial dan ekonomi, karena anak yang mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, tingkat pendidikan yang lebih singkat, serta produktivitas yang menurun pada usia dewasa. Dengan demikian, stunting tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kesehatan, melainkan sebagai persoalan pembangunan yang kompleks dan lintas sektor (World Health Organization, 2010; World Health Organization, 2014; World Health Organization, UNICEF, & World Bank, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menempatkan penurunan stunting sebagai agenda prioritas nasional melalui berbagai kebijakan dan strategi, termasuk pendekatan konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif. Berbagai instrumen kebijakan seperti Survei Status Gizi Indonesia dan sistem pencatatan berbasis e-PPGBM dikembangkan untuk mendukung perencanaan berbasis data. Meskipun demikian, capaian penurunan stunting secara nasional belum sepenuhnya merata, dan sejumlah daerah masih menunjukkan prevalensi yang relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada proses implementasi di tingkat daerah dan lokal (Bappenas, 2018; Bappenas, 2020; Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, 2022).

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting dengan tingkat prevalensi yang fluktuatif. Peningkatan angka stunting dalam periode tertentu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas determinan stunting di wilayah tersebut. Faktor geografis, sosial ekonomi masyarakat pesisir, serta keterbatasan kapasitas pemerintahan nagari menjadi konteks penting yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Dalam struktur pemerintahan daerah di Sumatera Barat, nagari memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga menjadi aktor kunci dalam implementasi program penanganan stunting (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023; Sutiyo & Maharjan, 2017).

Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie menjadi menarik untuk dikaji karena telah menunjukkan berbagai inisiatif lokal dalam mendukung percepatan penurunan stunting, namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek perencanaan berbasis data dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran analitis mengenai bagaimana kebijakan penanganan stunting diimplementasikan di tingkat nagari, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta tantangan struktural yang

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

dihadapi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian kebijakan publik di tingkat lokal sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola penanganan stunting (Grindle, 1980; Pressman & Wildavsky, 1984; Hill & Hupe, 2014).

KAJIAN PUSTAKA

Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah standar deviasi yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, stunting dipahami sebagai manifestasi dari kekurangan gizi kronis yang berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat anak tumbuh. Literatur mutakhir menegaskan bahwa stunting bukanlah peristiwa tunggal, melainkan hasil dari proses panjang ketidakcukupan asupan gizi, rendahnya kualitas pengasuhan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan sanitasi yang layak. Oleh karena itu, stunting merefleksikan akumulasi kerentanan struktural yang dialami rumah tangga miskin dan kelompok rentan (World Health Organization, 2010; World Health Organization, 2014; World Health Organization, UNICEF, & World Bank, 2021).

Determinasi stunting secara konseptual dapat dipahami melalui kerangka determinan langsung, tidak langsung, dan determinan dasar. Determinan langsung meliputi asupan gizi yang tidak adekuat dan penyakit infeksi berulang, determinan tidak langsung mencakup ketersediaan pangan rumah tangga, kualitas sanitasi, air bersih, serta akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, sementara determinan dasar berakar pada faktor struktural seperti kemiskinan, pendidikan orang tua, dan ketimpangan sosial. Kerangka ini menegaskan bahwa intervensi stunting memerlukan pendekatan yang melampaui sektor kesehatan semata dan menuntut keterlibatan lintas sektor secara simultan (World Health Organization, 2014; Bappenas, 2018).

Dalam konteks kebijakan publik, penanganan stunting di Indonesia diarahkan melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting yang menekankan prinsip konvergensi. Konvergensi dimaknai sebagai penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan program lintas sektor agar intervensi gizi spesifik dan sensitif dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat. Literatur kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pendekatan konvergensi sangat bergantung pada kapasitas institusional pemerintah daerah, kualitas koordinasi antaraktor, serta ketersediaan data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan (Bappenas, 2018; Bappenas, 2020; Kementerian Desa PDTT, 2021).

Desentralisasi pemerintahan memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah dan pemerintahan desa atau nagari untuk berperan aktif dalam implementasi kebijakan stunting. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan lokal, nagari tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai arena artikulasi kebutuhan masyarakat dan inovasi kebijakan berbasis konteks lokal. Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa, kepemimpinan lokal yang responsif, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program penanganan stunting di tingkat akar rumput (Sutiyo & Maharjan, 2017; Kemendes PDTT, 2021).

Literatur implementasi kebijakan juga menyoroti adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Faktor keterbatasan sumber daya manusia, inkonsistensi data antar sistem informasi, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi sering kali menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks stunting, perbedaan antara data survei nasional dan data rutin pelayanan kesehatan menimbulkan tantangan dalam perencanaan berbasis bukti di tingkat lokal. Oleh sebab itu, analisis kebijakan stunting di tingkat nagari perlu ditempatkan dalam kerangka implementasi kebijakan yang mempertimbangkan dinamika aktor, institusi, dan konteks lokal secara komprehensif (Grindle, 1980; Pressman & Wildavsky, 1984; Hill & Hupe, 2014; Kementerian Kesehatan RI, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan desain kualitatif yang diperkaya oleh pemanfaatan data sekunder kuantitatif secara terbatas. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal, kapasitas kelembagaan, serta dinamika pelaksanaan program di lapangan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji kebijakan secara kontekstual dengan

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan institusional yang melingkupi lokasi penelitian.

Lokasi penelitian difokuskan di Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa nagari tersebut termasuk wilayah yang aktif melaksanakan berbagai inisiatif percepatan penurunan stunting, namun masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. Rentang waktu kajian mencakup periode tahun 2022 hingga 2023, disesuaikan dengan ketersediaan data prevalensi stunting dan dokumen kebijakan yang dapat diakses secara publik.

Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang meliputi laporan resmi pemerintah daerah, publikasi dinas terkait, data prevalensi stunting tingkat kabupaten dan kecamatan, serta dokumentasi kegiatan nagari yang berhubungan dengan penanganan stunting. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademik, hasil kajian kebijakan, dan dokumen strategis nasional sebagai rujukan konseptual dan analitis. Keterbatasan akses terhadap data primer by-name-by-address di tingkat nagari menyebabkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis dokumen dan data agregat yang tersedia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengombinasikan interpretasi kualitatif terhadap dokumen kebijakan dan data kuantitatif secara sederhana. Data dianalisis melalui proses pengelompokan informasi, penafsiran konteks kebijakan, serta sintesis temuan dengan kerangka kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan lokal. Pendekatan ini digunakan untuk memahami tidak hanya bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga mengapa berbagai kendala implementasi masih terjadi di tingkat nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan

Di tengah akselerasi pembangunan daerah yang semakin menekankan pada peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, persoalan stunting masih menjadi tantangan mendasar yang memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan. Stunting bukan sekadar indikator fisik berupa tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya, melainkan cerminan dari persoalan multidimensi yang menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi gangguan perkembangan

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

kognitif, kerentanan terhadap penyakit, serta keterbatasan produktivitas pada usia dewasa. Dengan demikian, stunting harus dipahami sebagai isu strategis pembangunan manusia, bukan semata persoalan kesehatan.

Stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu lama, terutama sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada fase inilah pertumbuhan fisik dan perkembangan otak berlangsung sangat pesat dan menentukan kualitas hidup anak di masa mendatang. Ketika intervensi pada periode ini tidak optimal, dampaknya cenderung bersifat permanen dan sulit diperbaiki di kemudian hari.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam penurunan angka stunting. Karakteristik geografis yang luas, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, serta disparitas akses layanan dasar antarwilayah memengaruhi efektivitas intervensi yang dijalankan. Upaya penanganan stunting di daerah ini umumnya mengacu pada kebijakan nasional, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti ketersediaan sumber daya, tingkat pendidikan masyarakat, serta budaya dan pola pengasuhan anak.

Di tingkat nagari, termasuk Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, telah muncul berbagai inisiatif berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran gizi dan kesehatan keluarga. Kegiatan edukasi gizi, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi lokal. Meski demikian, tantangan implementasi masih cukup signifikan, terutama terkait koordinasi lintas sektor dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Salah satu program yang menjadi perhatian dalam percepatan penurunan stunting adalah Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Program ini merupakan gerakan gotong royong nasional yang digagas oleh BKKBN dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat. Fokus utama BAAS adalah pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dari keluarga berisiko stunting, terutama pada periode 1.000 HPK.

BAAS dirancang tidak hanya sebagai program bantuan pangan, tetapi juga sebagai upaya komprehensif yang mencakup edukasi, pendampingan, dan pemantauan tumbuh

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

kembang anak. Bantuan paket gizi yang diberikan bertujuan untuk memastikan kecukupan asupan nutrisi, khususnya protein hewani yang berperan penting dalam pertumbuhan linear anak. Selain itu, penyuluhan kepada ibu mengenai ASI eksklusif dan MPASI bergizi menjadi komponen penting dalam mengubah pola asuh dan praktik pemberian makan anak.

Tujuan utama Program BAAS meliputi pemastian kecukupan gizi anak, peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu, pemantauan pertumbuhan anak secara berkala, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam satu gerakan terpadu, BAAS diharapkan mampu menjangkau keluarga sasaran secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan pilar krusial dalam keberhasilan program penanganan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan. Intervensi gizi spesifik dan sensitif sangat bergantung pada tenaga pelaksana di lapangan, mulai dari tenaga kesehatan di Puskesmas, ahli gizi, bidan desa, hingga kader Posyandu. Mereka berperan langsung dalam memberikan layanan kesehatan, edukasi gizi, serta pendampingan keluarga.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Selain itu, kapasitas kader Posyandu dan relawan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas SDM ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat menentukan efektivitas intervensi stunting.

Penanganan stunting yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif melalui integrasi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik secara langsung menargetkan penyebab biologis kekurangan gizi, seperti melalui suplementasi mikronutrien bagi ibu hamil, promosi ASI eksklusif, pemberian MPASI bergizi, serta penanganan gizi buruk akut. Upaya ini umumnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan sangat krusial pada periode 1.000 HPK.

Di sisi lain, intervensi gizi sensitif berfokus pada faktor-faktor tidak langsung yang memengaruhi status gizi, seperti kemiskinan, sanitasi, akses air bersih, pendidikan, dan ketahanan pangan. Integrasi tujuan gizi ke dalam sektor pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sinergi antara kedua

jenis intervensi ini memastikan bahwa perbaikan gizi tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan.

Dukungan terhadap ASI eksklusif merupakan salah satu intervensi paling efektif dalam pencegahan stunting. ASI menyediakan nutrisi yang ideal serta perlindungan imunologis bagi bayi selama enam bulan pertama kehidupannya. Praktik menyusui yang optimal berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kesehatan jangka panjang anak.

Keberhasilan ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sekitar ibu. Dukungan emosional dan praktis dari pasangan, keluarga, serta tenaga kesehatan menjadi faktor penentu dalam mengatasi berbagai hambatan menyusui. Oleh karena itu, edukasi tidak hanya ditujukan kepada ibu, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang mendukung praktik menyusui secara optimal.

Peningkatan sanitasi dan akses air bersih merupakan fondasi penting dalam upaya pencegahan stunting. Lingkungan yang tidak sehat meningkatkan risiko infeksi berulang, seperti diare, yang dapat menghambat penyerapan nutrisi pada anak. Penyediaan infrastruktur sanitasi yang layak, fasilitas cuci tangan, serta akses terhadap air minum yang aman harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya perbaikan sanitasi dan air bersih tidak hanya berdampak pada penurunan penyakit menular, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak dapat tumbuh lebih sehat dan optimal, sementara orang dewasa menjadi lebih produktif dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, investasi pada sektor ini memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan manusia.

Penanganan stunting menuntut sinergi lintas sektor yang kuat dan terkoordinasi. Keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mengatasi akar penyebab stunting yang bersifat multidimensi. Integrasi program gizi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial harus didukung oleh data yang akurat agar intervensi tepat sasaran.

Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa penanganan stunting tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Dengan komitmen bersama dan partisipasi aktif masyarakat, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat berjalan lebih

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

efektif dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Secara keseluruhan, stunting merupakan persoalan pembangunan manusia yang memerlukan perhatian serius dan pendekatan komprehensif. Pengalaman Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh sinergi program, ketersediaan SDM yang berkualitas, serta partisipasi aktif masyarakat. Melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, dukungan terhadap ASI eksklusif, perbaikan sanitasi dan air bersih, serta kolaborasi lintas sektor, upaya penurunan stunting dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masa depan generasi penerus.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian kebijakan berkelanjutan. Data yang tersedia menunjukkan bahwa prevalensi stunting di tingkat kabupaten mengalami peningkatan dari 25,2 persen pada tahun 2022 menjadi 29,8 persen pada tahun 2023, dengan jumlah kasus mencapai 2.314 anak. Sementara itu, Kecamatan Batang Kapas tercatat memiliki sekitar 130 kasus stunting pada Mei 2023, yang menandakan bahwa kecamatan ini termasuk wilayah dengan beban stunting yang relatif tinggi. Gambaran kuantitatif ini menunjukkan adanya urgensi penguatan intervensi kebijakan, khususnya di tingkat nagari yang menjadi garda terdepan pelaksanaan program.

Dari sisi implementasi kebijakan di tingkat nagari, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie menunjukkan adanya berbagai inisiatif lokal dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Kegiatan seperti pembentukan pos gizi, pelaksanaan lomba penyuluhan, serta penyelenggaraan rembuk stunting mencerminkan adanya partisipasi masyarakat dan komitmen pemerintah nagari dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik lokal. Namun demikian, sebagian besar kegiatan tersebut masih bersifat episodik dan berorientasi pada kegiatan tertentu, sehingga belum sepenuhnya membentuk intervensi jangka panjang yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting terlihat lebih kuat di tingkat kabupaten, terutama melalui pembentukan tim audit kasus stunting dan upaya intervensi terpadu. Akan tetapi, pada tingkat nagari, koordinasi tersebut masih menghadapi berbagai

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

tantangan, terutama terkait integrasi data, kapasitas kader posyandu, serta keterbatasan alokasi anggaran. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan intervensi sensitif dan spesifik di tingkat akar rumput.

Aspek pengukuran dan pencatatan data juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Pencatatan rutin melalui posyandu dengan menggunakan sistem e-PPGBM sebenarnya memiliki potensi besar untuk menyediakan data by-name-by-address yang dibutuhkan dalam penargetan intervensi. Namun, implementasi sistem ini belum berjalan merata di seluruh nagari, sehingga kualitas dan validitas data masih menjadi kendala. Ketidakterpaduan data tersebut menyulitkan penentuan sasaran pemberian makanan tambahan dan intervensi sensitif lainnya secara tepat.

Hambatan implementasi kebijakan stunting di nagari juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Perbedaan angka antara data survei nasional dan data rutin pelayanan kesehatan berdampak pada proses evaluasi dan perencanaan program. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kader posyandu dan tenaga kesehatan, serta minimnya insentif yang diterima, turut mempengaruhi kualitas pelaksanaan program. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan keluarga, pola asuh anak, dan keterbatasan akses pangan bergizi juga menjadi determinan penting yang memperkuat risiko terjadinya stunting di wilayah pesisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie telah menunjukkan adanya upaya dalam penanganan stunting melalui berbagai kegiatan seperti pos gizi, penyuluhan, dan rembuk stunting. Upaya-upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah nagari dalam mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih belum konsisten dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemanfaatan data e-PPGBM secara sistematis dalam perencanaan dan penganggaran nagari.

Peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2022 hingga 2023, serta tingginya jumlah kasus di Kecamatan Batang Kapas, menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih memerlukan perhatian kebijakan yang lebih terfokus pada wilayah dengan beban tinggi. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan data by-

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

name-by-address yang terintegrasi, kapasitas dan insentif kader posyandu yang belum memadai, keterbatasan anggaran lokal, serta pengaruh faktor kemiskinan dan pola asuh keluarga terhadap determinan gizi anak.

Oleh karena itu, penanganan stunting di tingkat nagari perlu diarahkan pada penguatan integrasi data dan perencanaan pembangunan. Pemanfaatan data e-PPGBM secara optimal dalam penyusunan rencana kerja nagari menjadi langkah strategis untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Penguatan kapasitas kader posyandu dan dukungan teknis dari puskesmas juga perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan penganggaran lokal yang lebih terarah untuk mendukung program gizi jangka panjang serta sinergi dengan sumber pendanaan lainnya. Pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, pertanian, dan sosial menjadi penting untuk menangani determinan stunting secara komprehensif. Dengan penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data yang konsisten, kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

Bappenas. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Bappenas. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Laporan Situasi Stunting Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press

Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (3rd ed.). London: Sage Publications

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak*. Jakarta: Kemenkes RI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press

Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer

World Health Organization. (2010). *Nutrition Landscape Information System (NLIS): Country Profile Indicators*. Geneva: WHO

World Health Organization. (2014). *Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief*. Geneva: WHO

World Health Organization, UNICEF, & World Bank. (2021). *Levels and Trends in Child Malnutrition*. Geneva: WHO